

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL,  
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA  
TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**Disusun Oleh:**

**Elisabeth Aprilia Sukma Dewi**

**NPM : 16 04 22564**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**Skripsi**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL,  
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA  
TAHUN 2018**



**Disusun Oleh:**

**Elisabeth Aprilia Sukma Dewi**

**NPM : 16 04 22564**

Telah dibaca dan disetujui oleh:

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heni Kurniawan", is positioned below the "Pembimbing" label.

**Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.**

**09 Desember 2020**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**SURAT KETERANGAN**

**No. 059/J/1**

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Kamis, 7 Januari 2021 dengan susunan pengujian sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.        | (Ketua Penguji) |
| 2. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.      | (Anggota)       |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota)       |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Elisabeth Aprilia Sukma Dewi  
NPM : 160422564

Dinyatakan

**Lulus Dengan Revisi**

Pada saat ini skripsi Elisabeth Aprilia Sukma Dewi telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia pengujian.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



**Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL,  
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

**TAHUN 2018**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 09 Desember 2020

Yang menyatakan



Elisabeth Aprilia Sukma Dewi

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih dan kekuatan yang melimpah kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ch. Heni Kurniawan, SE., M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Papa, Mama, dik Ana, dik Tika, dan dik Mikael, keluarga penulis yang selalu mencintai, mengingatkan, dan memberikan dukungan doa kepada penulis.
4. Simbah, Pakdhe, Budhe, Om, Bulik, Mbak, Adik, dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan penulis.

5. Mas Karim, sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dengan mencela, sehingga menjadi motivasi bagi penulis.
6. Niken dan Irna, sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Alma, sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Dian, Dias, Nana, Putri, dan Baybay sahabat penulis yang selalu memberi dukungan secara mental sehingga dapat memberi semangat kepada penulis.
9. Teman-teman yang penulis temui selama masa perkuliahan, Monic, Ayu, Veny, Evelin, Xina, dan Veve yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 09 Desember 2020



Elisabeth Aprilia Sukma Dewi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....</b>	<b>9</b>
2.1. Otonomi Daerah .....	9
2.1.1. Definisi Otonomi Daerah .....	9
2.1.2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah .....	10
2.1.3. Tujuan Otonomi Daerah .....	11
2.1.4. Pelayanan Publik .....	12
2.2. Keuangan Daerah .....	14

2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	15
2.3.1. Definisi Keuangan Pemerintah Daerah .....	15
2.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	15
2.3.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	16
2.4. Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.4.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.4.2. Jenis Pendapatan Asli Daerah .....	20
2.5. Dana Bagi Hasil .....	24
2.6. Dana Alokasi Umum .....	25
2.7. Dana Alokasi Khusus .....	26
2.8. Belanja Modal .....	27
2.9. Kerangka Konseptual .....	29
2.9.1. Teori Sinyal ( <i>Signaling Theory</i> ) .....	29
2.9.2. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	30
2.9.3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan .....	32
2.9.4. Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah .....	33
2.9.5. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan .....	34
2.9.6. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan .....	34



2.9.7. Hubungan Belanja Modal terhadap Kemandirian	
Keuangan .....	35
2.10. Hasil Penelitian Terdahulu .....	36
2.11. Pengembangan Hipotesis .....	39
2.11.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian	
Keuangan .....	39
2.11.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian	
Keuangan .....	40
2.11.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian	
Keuangan .....	41
2.11.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian	
Keuangan .....	42
2.11.5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian	
Keuangan .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Objek dan Subjek Penelitian .....	44
3.2. Populasi .....	44
3.3. Sampel .....	44
3.4. Variabel Penelitian .....	45
3.5. Operasionalisasi Variabel .....	45
3.6. Model Penelitian .....	48

3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.7.1. Jenis Data .....	48
3.7.2. Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.8. Analisis Data .....	49
3.8.1. Uji Pendahuluan .....	49
3.8.1.1. Uji Normalitas .....	49
3.8.1.2. Uji Asumsi Klasik .....	49
3.8.1.3. Statistik Deskriptif .....	52
3.9. Uji Hipotesis .....	53
3.9.1. Hipotesis Statistik .....	53
3.9.2. Tingkat Kesalahan .....	54
3.9.3. Model Pengujian .....	55
3.9.4. Kriteria Pengujian .....	56
3.10. Rencana Pembahasan .....	57
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1. Sampel Penelitian .....	58
4.2. Analisis Statistik Deskriptif .....	65
4.3. Uji Asumsi Klasik .....	68
4.3.1. Uji Normalitas .....	68
4.3.2. Uji Multikolinearitas .....	69
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas .....	70

4.3.4. Uji Autokorelasi .....	72
4.4. Pengujian Hipotesis .....	73
4.5. Pengujian Statistik .....	75
4.5.1. Uji Nilai t .....	75
4.5.2. Uji Nilai F .....	75
4.5.3. Koefisien Determinasi .....	76
4.6. Hasil dan Pembahasan .....	77
4.6.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan .....	78
4.6.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan .....	79
4.6.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan .....	79
4.6.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan .....	80
4.6.5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1. Kesimpulan .....	83
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	86
5.3. Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN II .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN III .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN IV .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN V .....</b>	<b>113</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....	18
Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel .....	45
Tabel 3.2. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi .....	52
Tabel 4.1. Sampel Penelitian .....	58
Tabel 4.2. Daftar Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah .....	59
Tabel 4.3. Statistik Deskriptif .....	69
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas .....	72
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas .....	73
Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	74
Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi .....	75
Tabel 4.8. Hasil Pengujian Hipotesis .....	76
Tabel 4.9. Hasil Uji Nilai F .....	79
Tabel 4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Model Penelitian .....	48
Gambar 3.2. Pengujian satu sisi (hipotesis berarah positif, H1, dan H5) .....	54
Gambar 3.3. Pengujian satu sisi (hipotesis berarah negatif, H2, H3, dan H4) .....	55



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL,  
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2018**

**Disusun Oleh:**

**Elisabeth Aprilia Sukma Dewi  
16 04 22564**

**Pembimbing:**

**Ch. Heni Kurniawan, Se., M.Si.**

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yogyakarta  
Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali penelitian terdahulu antar variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan dan subjek pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah di Indonesia.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data arsip sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari catatan yang sudah ada. Penelitian ini mengambil sampel menggunakan metode nonprobabilitas dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia yang telah diaudit BPK pada periode tahun 2018 dengan jumlah 220 sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

***Kata Kunci*** : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu peranan penting sejak lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan telah direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengemukakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Adanya otonomi daerah ini membuat setiap pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan daerahnya. Lalu dalam penyelenggaraannya, pemerintah menganut asas desentralisasi yang diharapkan dapat mempercepat



terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat juga peningkatan daya saing daerah. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah (Halim, 2004).

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik (Ardila dan Putri, 2015). Dalam mengukur kinerja keuangan daerah bisa dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan.

Bisma dan Susanto (2010) menjelaskan bahwa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan yang bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007).

Untuk mengukur rasio tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kemandirian keuangan suatu daerah. Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri

utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi salah satunya yaitu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Idealnya semua pengeluaran daerah sebisa mungkin dapat dipenuhi dengan menggunakan PAD sehingga daerah harus benar-benar otonom, tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat atau dana perimbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saragih (2003) menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Yani (2002), dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Semakin besar persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin besar kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah, sebaliknya semakin kecil persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin kecil kontribusi yang diberikan DBH terhadap penerimaan daerah. Menurut Sidik (2004), Distribusi dana alokasi umum kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif besar akan lebih kecil memperoleh dana alokasi umum dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif besar. Maka semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima suatu daerah maka

semakin rendah tingkat kemandiriannya. Menurut Yani (2002), dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus dan belanja modal sebagai variabel independen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Mulatsih (2015) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pada daerah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2008 - 2012. Penelitian terdahulu oleh Iksari (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif, dana alokasi khusus berpengaruh negatif, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian terdahulu oleh Ayu (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Barat tahun 2014 - 2015 yang diukur dengan rasio kemandirian dan rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Penelitian oleh Antari dan Sedana (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Bali tahun 2011 – 2015, dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011 -

2015 yang diukur dengan rasio pertumbuhan. Marizka (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif, sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006 – 2011. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tahun 2006 - 2011 yang diukur dengan rasio kemandirian.

Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan variabel dependen yaitu rasio kemandirian keuangan dengan subyek Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota satu Provinsi saja. Tujuan peneliti adalah untuk menguji kembali variabel-variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap variabel dependen kemandirian keuangan, dengan subyek yang berbeda dan lebih luas yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat megeneralisasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti mengambil subyek Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia berdasarkan informasi dari [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com), realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Serang berada di bawah 25% pada tahun 2017. Informasi yang didapat dari <http://nasional.kontan.co.id>, di tingkat kabupaten atau kota, terdapat 291 daerah yang mengalami kenaikan DAU tahun 2018 dengan jumlah kenaikan Rp 7,9 triliun, dimana semakin tinggi DAU yang diterima suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemandiriannya. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan

tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD, namun menurut informasi dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota tahun 2018 menunjukkan penurunan dibanding dengan tahun 2017 sebesar 1,2%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2004), namun informasi yang didapat dari <https://nasional.kontan.co.id> bahwa berdasarkan data Kemkeu, realisasi DAK hingga 31 Juli 2015 baru mencapai Rp 23,2 triliun setara 39,5% dari pagu Rp 58,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, dimana realisasi DAK masih terbilang rendah dari pendapatan DAK di Indonesia.

Berdasarkan beberapa informasi yang didapat, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Kinerja pemerintah di beberapa daerah di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan, sehingga peneliti mengambil subyek Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti mengambil judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan motivasi yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian kembali penelitian terdahulu antar variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan. Penelitian ini menggunakan subyek yang berbeda dan lebih luas yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda dan mencoba memverifikasi fenomena yang ditemukan peneliti pada subyek tersebut dengan teori yang ada dengan variabel yang berbeda, yaitu kategori pola hubungan situasional.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, sumbangan referensi dan pelengkap pada penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien serta lebih baik lagi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Adapun tujuan peneliti adalah untuk melakukan pengujian kembali penelitian terdahulu antar variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan, dengan subyek yang berbeda dan lebih luas yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia. Meningkatnya pendapatan asli daerah akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, namun jika PAD menurun, maka kemandirian keuangan daerah juga akan menurun dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat meningkat.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan variabilitas jumlah Dana Bagi Hasil disetiap pemerintah kabupaten/ kota daerah di Indonesia.



3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah belum dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi besar kepada pendapatan asli daerah, sehingga rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia. Jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia. Meningkatnya belanja modal, maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan tujuan untuk melakukan pengujian kembali penelitian terdahulu antar variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan, dengan subyek yang berbeda dan lebih luas yaitu

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia. Variabel pertama menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulatsih (2015), Ayu (2018), Antari dan Sedana (2018), dan Marizka (2013), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan. Variabel kedua menunjukkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka (2013), yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan. Variabel ketiga menunjukkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka (2013), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ikasari (2015), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif. Variabel keempat menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ikasari (2015) dan Marizka (2013), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan. Variabel kelima menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ikasari (2015), yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Antari dan Sedana (2018), yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya 220 dari 508 pemerintah kabupaten/ kota dari seluruh Indonesia yang dapat dijadikan sampel penelitian. Peneliti menduga bahwa banyak pemerintah daerah yang belum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga hanya sedikit pemerintah kabupaten/ kota yang telah diaudit BPK. Selain itu, keterbatasan lain yang peneliti temukan adalah pada periode penelitian yang digunakan, masih terdapat variabilitas jumlah dana bagi hasil yang diterima kabupaten/ kota di Indonesia yang menyebabkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah penggunaan dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah belum dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi besar kepada pendapatan asli daerah, sehingga menyebabkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

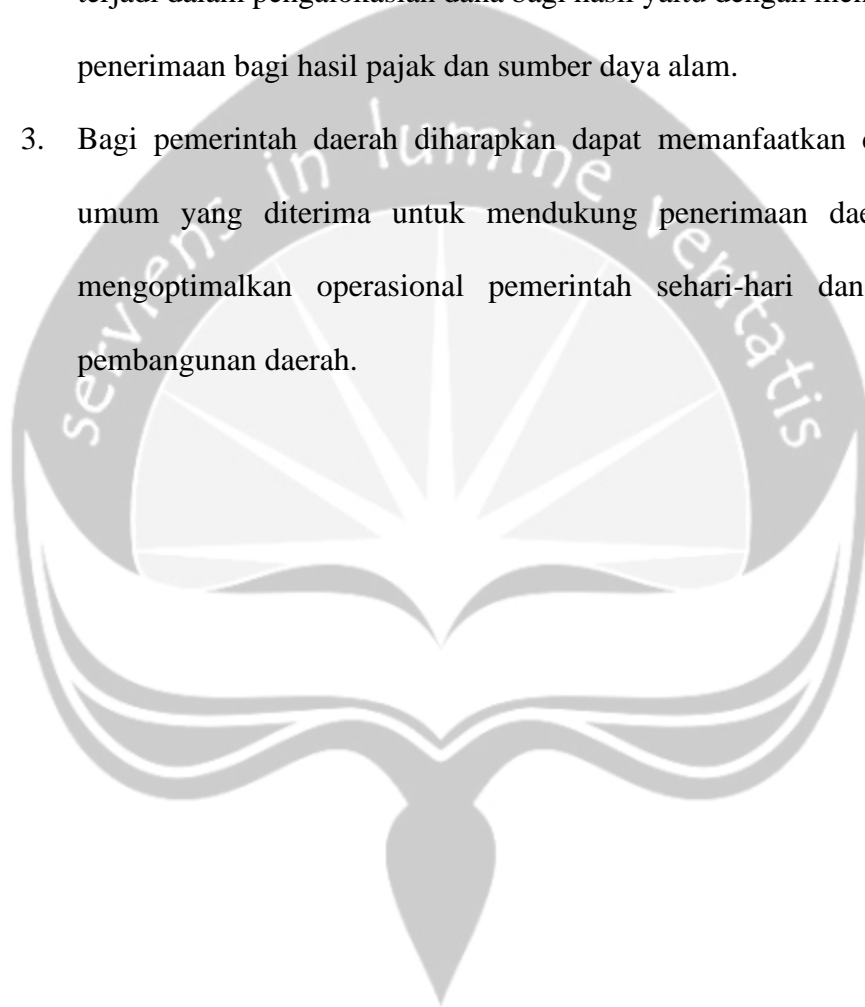
## **5.3. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan memberikan sanksi untuk daerah yang terlambat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD), sehingga daerah dapat tertib dalam membuat laporan keuangannya.

2. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi variabilitas yang terjadi dalam pengalokasian dana bagi hasil yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
3. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana alokasi umum yang diterima untuk mendukung penerimaan daerah dengan mengoptimalkan operasional pemerintah sehari-hari dan melakukan pembangunan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grasindo.
- Antari, S., dan Sedana, P. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Bali: Universitas Udayana.
- Ardila, I., dan Putri., A.N. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Vol. 15, No.1).
- Arfyansyah., Rahmad, D., dan Haryanto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, (Vol. 2, No. 3).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu, P. (2018). *Analisis PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat*. Skripsi, Kediri: FE. UN PGRI.
- Bastian, I.(2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bisma, I.D.G., dan Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, *Jurnal Genec Swara Edisi Khusus*, (Vol 4, No 3:75-86).
- Bratakusumah, D.S., dan Solihin, D. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Erlina., Rambe, S.O., dan Rusdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fernandez. (2002). *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Refomasi: Antara Ilusi dan Fakta*. Jakarta: IPOS dan Ford Foundation.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25* (Edisi 9). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP-AMP YKPN.

- \_\_\_\_\_. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi 3). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman* (edisi 5). Yogyakarta, Indonesia: BPFU UGM.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis. Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman* (edisi 6). Yogyakarta, Indonesia: BPFU UGM.
- Ikasari, P. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi, Yogyakarta: FE. PGRI.
- Jensen., dan Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, *Jurnal Of Financial Economics*, (Vol 3- No 4:305-306).
- KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada tanggal 18 April 2020, dari <https://kbbi.web.id/otonomidaerah>.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Diakses 20 April 2020, dari [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/MENPAN\\_63\\_2003](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/MENPAN_63_2003)
- Lane, J. (2002). *New Public Management*. London: Routledge Publications.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- \_\_\_\_\_. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, (Vol. 2).
- \_\_\_\_\_. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marizka, R. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)*. Skripsi, Padang: Universitas Negeri Padang.
- Mulatsih. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012*. Skripsi, Sumatera: STIE Mulia Darma Pratama.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses pada 17 April 2020, dari <http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses pada 19 April 2020, dari <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/873.bpkp>.
- Ross, S.A. (1977). The Determination of Financial Structure : The Incentive Signalling Approach. *Journal of Economics*, (Spring, 8. pp 23-40).
- Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Widjaja, H.A.W. (2007). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wong, J.D. (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, (pp 413-423).
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.





## LAMPIRAN I

### DATA REALISASI APBD DAN ANALISA DATA

Realisasi APBD Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No	Nama Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal	Pinjaman
1	Kab. Aceh Besar	159.480.163.138	18.274.808.727	713.344.629.000	198.391.154.414	256.173.868.996	-
2	Kab. Aceh Singkil	45.289.515.137	17.190.804.329	440.493.158.627	119.272.244.615	103.786.508.547	-
3	Kab. Aceh Tengah	150.818.710.372	15.171.845.759	603.737.495.000	210.625.435.066	180.831.285.122	5.000.000.000
4	Kab. Aceh Tenggara	80.263.476.272	12.159.923.089	580.439.180.343	151.157.752.221	147.848.275.220	-
5	Kab. Aceh Utara	231.848.856.926	137.541.887.259	835.915.569.772	368.966.298.656	223.274.922.406	-
6	Kab. Simeulue	63.146.021.911	11.900.456.373	444.554.705.000	132.388.792.225	137.450.686.403	-
7	Kota Banda Aceh	246.272.150.485	40.072.750.406	591.711.772.000	116.595.706.007	100.757.750.369	-
8	Kota Sabang	57.188.076.200	11.627.499.188	350.863.359.000	127.162.931.061	113.657.122.720	-
9	Kota Langsa	121.316.713.329	17.662.766.108	444.012.586.000	131.946.202.463	115.478.103.942	-
10	Kab. Gayo Lues	48.758.464.134	17.043.891.375	462.943.021.000	169.968.147.104	182.929.286.128	-
11	Kab. Nagan Raya	97.118.515.691	19.739.956.222	501.612.944.200	146.257.947.462	186.621.969.989	-
12	Kab. Aceh Tamiang	139.261.841.912	85.709.353.708	532.641.693.000	163.435.948.924	177.269.500.709	-
13	Kab. Pidie Jaya	57.432.814.785	12.061.027.325	420.639.477.000	177.314.380.841	178.921.414.604	-
14	Kab. Karo	159.189.197.472	17.918.853.826	738.378.312.000	184.960.051.262	222.116.791.413	-
15	Kab. Mandailing Natal	84.809.923.496	32.375.811.181	783.200.132.000	248.799.513.596	199.849.014.897	-
16	Kab. Nias	88.754.606.115	12.817.669.290	428.647.259.166	166.785.764.834	207.016.876.763	-
17	Kab. Tapanuli Utara	105.656.762.964	37.516.300.069	639.394.068.000	191.102.620.448	181.662.031.464	-
18	Kab. Toba Samosir	52.298.960.803	18.857.853.436	528.490.802.000	158.583.101.253	152.970.216.966	-
19	Kota Medan	1.636.204.514.684	216.767.245.746	1.583.624.375.000	356.788.804.200	753.996.886.210	-
20	Kota Pematangsiantar	137.052.839.193	25.332.212.286	583.106.207.000	188.366.544.385	287.958.994.695	-
21	Kota Sibolga	81.245.733.812	16.150.281.523	405.554.215.000	90.935.128.378	142.467.823.362	-
22	Kota Padangsidimpuan	75.063.575.093	18.526.242.318	498.221.822.177	124.683.309.074	113.072.061.374	-
23	Kab. Pakpak Bharat	20.061.207.923	14.284.922.843	339.271.690.000	71.532.318.937	118.336.626.935	6.403.620.000
24	Kab. Nias Selatan	19.605.734.782	15.868.595.462	556.174.150.536	199.651.552.996	221.305.834.645	-
25	Kab. Humbang Hasundutan	92.735.853.813	15.845.293.341	523.818.445.000	142.133.738.492	168.860.963.829	-
26	Kab. Serdang Bedagai	194.382.972.213	43.952.777.826	763.943.386.000	310.984.166.553	349.104.338.217	-
27	Kab. Samosir	47.446.623.389	14.543.956.836	453.737.230.000	139.883.498.974	186.281.849.902	-
28	Kab. Batubara	64.385.292.862	31.051.731.219	602.464.355.000	151.358.139.644	139.977.493.680	-
29	Kab. Padang Lawas	47.455.308.607	27.263.706.899	521.562.942.000	157.464.009.272	204.458.003.516	-
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	52.209.768.574	61.294.111.786	504.525.796.000	147.933.110.879	219.379.315.619	-

31	Kab. Labuhanbatu Utara	57.010.690.546	41.118.873.952	588.021.836.000	235.115.494.290	223.037.632.088	-
32	Kab. Nias Utara	50.395.504.636	13.216.312.833	413.338.900.108	138.222.720.874	192.092.726.869	-
33	Kab. Nias Barat	40.193.008.207	12.867.069.224	347.722.710.417	207.417.409.039	247.896.475.505	-
34	Kota Gunungsitoli	29.456.354.563	15.374.623.215	426.758.929.000	109.906.226.086	183.521.284.315	-
35	Kab. Sijunjung	79.055.940.215	12.445.768.815	548.573.107.000	139.505.882.043	205.818.505.036	-
36	Kota Padang	487.937.882.412	64.528.112.442	1.100.370.559.000	263.030.961.104	419.839.593.968	20.401.816.755
37	Kota Sawahlunto	47.227.132.335	19.143.752.466	374.920.211.899	64.440.294.740	77.527.748.798	-
38	Kota Solok	40.742.809.270	11.402.553.921	398.106.262.000	71.968.447.294	159.588.101.391	-
39	Kota Pariaman	32.213.303.037	11.588.903.939	415.241.327.000	83.096.934.607	132.430.598.581	-
40	Kab. Bengkalis	319.280.511.092	2.254.355.483.931	345.070.716.000	183.801.494.841	903.407.348.786	-
41	Kab. Indragiri Hilir	157.482.353.687	224.148.416.514	918.602.922.000	221.058.798.121	213.660.286.726	-
42	Kab. Indragiri Hulu	111.900.731.074	248.874.259.372	646.609.433.000	162.440.212.758	138.092.690.424	-
43	Kab. Rokan Hulu	85.734.030.158	230.712.870.609	654.291.480.000	234.938.355.856	353.287.341.468	-
44	Kab. Siak	290.637.100.257	919.191.111.750	323.264.044.452	146.405.056.399	179.484.354.900	-
45	Kab. Kepulauan Meranti	68.006.356.887	219.420.294.831	403.426.873.000	158.755.443.046	169.802.769.847	-
46	Kab. Kerinci	80.481.173.935	58.499.359.298	589.202.611.000	155.138.708.215	191.868.186.332	-
47	Kab. Merangin	89.304.559.028	63.774.750.863	718.849.295.000	195.612.477.142	207.241.385.868	-
48	Kab. Muaro Jambi	90.305.498.363	132.951.564.719	670.341.091.000	175.375.563.818	292.728.025.310	-
49	Kota Sungai Penuh	34.184.049.669	56.720.758.242	422.532.652.000	92.350.598.379	194.683.207.114	-
50	Kota Palembang	953.302.082.628	239.241.348.890	1.269.426.417.000	481.900.223.636	851.367.126.024	-
51	Kota Pagar Alam	73.600.344.354	130.555.406.121	391.943.478.000	113.818.849.262	92.576.062.279	-
52	Kab. Bengkulu Selatan	67.243.733.480	13.612.025.287	554.135.555.062	151.473.245.759	95.543.597.570	-
53	Kab. Bengkulu Utara	117.688.313.638	49.746.978.157	625.035.467.000	178.507.519.724	176.492.356.711	-
54	Kab. Rejang Lebong	84.508.249.815	15.269.448.012	593.702.491.000	199.934.328.125	170.608.442.315	-
55	Kab. Kaur	37.085.958.441	14.025.272.542	435.518.398.000	103.499.700.904	91.067.708.601	-
56	Kab. Seluma	58.028.361.578	18.055.609.934	497.868.275.000	165.274.694.591	121.010.535.778	-
57	Kab. Mukomuko	85.747.717.510	21.387.564.431	492.253.329.623	118.315.585.553	208.860.630.772	-
58	Kab. Lebong	35.309.104.727	16.615.458.315	405.048.287.000	94.531.189.096	141.122.921.327	-
59	Kab. Bengkulu Tengah	23.500.020.786	39.176.659.637	429.990.059.527	117.192.906.321	134.526.244.615	-
60	Kab. Lampung Barat	50.471.541.309	25.691.277.900	521.743.958.000	307.395.275.747	290.210.246.282	-
61	Kab. Lampung Selatan	215.411.464.186	39.874.632.015	1.019.207.779.000	144.690.413.176	383.352.881.955	-
62	Kab. Lampung Utara	102.289.605.032	30.024.880.739	949.531.402.000	226.503.513.121	193.419.766.707	-
63	Kab. Lampung Timur	125.035.523.317	69.740.971.630	1.069.168.109.000	355.997.075.079	285.430.669.668	-
64	Kab. Tanggamus	61.714.421.073	54.321.891.758	778.605.786.000	241.982.019.173	172.288.692.875	-
65	Kota Bandar Lampung	550.275.048.130	65.328.739.250	1.034.730.849.000	264.908.878.825	425.199.203.339	75.332.649.300
66	Kab. Pesawaran	58.265.161.929	25.985.164.708	669.276.831.000	251.198.228.288	331.911.625.554	-
67	Kab. Mesuji	33.206.360.524	30.223.861.132	446.272.067.000	139.144.719.622	240.570.374.862	-
68	Kab. Pesisir Barat	23.481.041.773	22.151.402.963	417.316.170.000	133.816.358.062	229.701.445.859	-

69	Kab. Bandung	927.543.321.132	340.443.860.129	2.060.202.697.000	737.019.669.306	713.093.010.272	-
70	Kab. Bogor	2.794.660.740.152	262.173.257.266	1.919.023.527.000	637.617.713.872	1.313.835.412.090	-
71	Kab. Garut	421.299.024.535	189.818.274.124	1.776.936.655.000	658.897.211.119	537.593.476.982	-
72	Kab. Purwakarta	368.851.052.594	100.684.485.641	854.419.670.000	265.883.032.920	228.163.717.126	-
73	Kab. Subang	400.755.045.571	148.888.589.796	1.282.509.399.625	436.390.303.341	486.207.641.997	-
74	Kota Bandung	2.571.591.786.199	321.723.850.260	1.643.076.905.000	462.437.060.573	1.015.003.770.589	-
75	Kota Bogor	912.197.971.289	94.958.394.936	791.929.143.000	179.875.196.265	455.461.723.593	55.640.573.400
76	Kota Cirebon	440.436.420.967	71.877.328.085	577.778.746.000	164.489.195.433	175.692.948.871	-
77	Kota Banjar	116.167.055.635	61.065.109.523	368.153.289.000	75.925.333.043	193.782.528.967	-
78	Kab. Bandung Barat	422.341.026.545	81.417.057.356	1.091.118.868.000	352.833.523.306	264.540.319.500	-
79	Kab. Batang	237.547.973.048	36.199.222.279	781.383.387.000	231.124.509.384	163.400.979.708	-
80	Kab. Blora	203.182.795.054	115.863.713.993	926.682.649.031	333.004.046.384	499.439.779.133	-
81	Kab. Brebes	346.907.972.510	32.660.114.961	1.321.798.057.000	398.599.759.143	527.158.454.521	-
82	Kab. Grobogan	315.743.531.675	40.960.700.086	1.094.460.434.000	385.401.361.674	423.425.389.079	-
83	Kab. Jepara	369.330.454.700	39.836.895.561	984.914.973.687	314.882.423.372	397.783.041.502	5.000.000.000
84	Kab. Kebumen	352.047.092.282	29.627.426.379	1.234.003.169.000	390.504.708.527	370.004.376.524	-
85	Kab. Klaten	395.884.244.135	41.131.449.124	1.237.967.327.000	373.028.991.537	384.574.980.960	-
86	Kab. Kudus	337.364.609.424	235.660.116.745	807.056.990.772	239.054.267.051	377.578.292.200	-
87	Kab. Magelang	325.089.093.092	36.431.591.975	1.060.540.612.000	301.160.637.595	501.727.375.261	-
88	Kab. Sukoharjo	433.485.481.219	26.507.198.592	906.416.629.000	286.887.271.862	388.468.318.338	-
89	Kab. Temanggung	252.019.934.778	50.075.868.022	793.485.677.000	225.548.811.404	185.771.793.520	-
90	Kab. Wonosobo	226.819.478.601	34.626.572.812	827.791.657.000	277.386.975.847	381.600.659.789	-
91	Kota Salatiga	208.926.057.032	24.417.997.942	448.067.710.000	88.527.219.754	222.021.981.988	-
92	Kab. Sleman	894.272.961.558	50.685.431.396	996.492.454.000	321.540.108.398	411.312.404.569	-
93	Kota Yogyakarta	667.493.075.470	46.678.379.697	658.504.186.000	162.523.890.048	325.092.739.056	2.550.000
94	Kab. Blitar	252.453.245.801	107.643.357.347	1.109.812.753.000	382.043.194.822	409.773.750.053	-
95	Kab. Bojonegoro	425.167.970.431	2.532.807.898.432	932.357.598.649	349.495.303.481	601.338.047.081	1.257.393.775
96	Kab. Gresik	957.255.706.269	184.996.926.377	909.888.092.000	330.283.398.649	369.883.330.557	-
97	Kab. Jember	597.509.388.023	171.575.657.659	1.697.477.217.000	478.354.824.047	532.247.571.649	-
98	Kab. Kediri	476.905.008.818	137.139.936.519	1.225.331.641.000	406.576.707.166	547.123.553.524	-
99	Kab. Ngawi	223.871.715.022	111.935.345.666	1.039.619.057.000	334.579.617.361	307.436.987.487	-
100	Kab. Pamekasan	222.410.664.049	135.741.325.291	849.764.469.000	266.900.962.262	317.340.696.506	-
101	Kab. Pasuruan	614.302.515.368	291.469.057.168	1.179.777.625.000	387.073.986.651	447.987.653.723	-
102	Kab. Ponorogo	289.017.741.958	107.415.121.904	1.038.913.988.811	405.686.933.708	403.302.695.098	-
103	Kab. Sampang	135.349.867.961	107.198.211.337	825.443.163.000	279.475.126.533	312.562.644.306	-
104	Kab. Sidoarjo	1.685.558.666.147	185.811.982.977	1.191.856.625.000	415.805.733.813	810.565.148.333	-
105	Kab. Tuban	442.531.646.744	154.291.392.724	1.027.874.285.222	311.052.055.461	494.963.683.321	-
106	Kota Blitar	163.026.005.753	100.776.111.296	421.212.306.000	104.546.300.626	160.034.400.214	-
107	Kab. Ketapang	190.356.708.116	116.868.267.611	1.122.269.534.000	335.157.692.404	619.139.061.403	-
108	Kab. Sambas	127.663.390.963	33.567.662.883	873.609.250.000	345.123.001.262	286.654.817.076	95.000.000.000
109	Kab. Kayong Utara	27.205.096.649	17.636.689.834	472.544.021.000	146.386.410.316	168.430.912.589	-
110	Kab. Barito Selatan	81.427.860.613	73.935.577.687	576.041.341.000	160.970.190.022	204.359.109.701	3.000.000.000

111	Kab. Seruyan	93.253.508.653	83.370.757.268	616.416.406.000	186.575.296.212	314.813.389.775	-
112	Kab. Murung Raya	59.797.986.152	149.919.908.455	667.654.598.000	188.877.237.394	230.400.463.675	-
113	Kab. Barito Timur	47.823.932.244	76.114.768.831	478.975.191.000	118.595.703.942	92.281.183.657	-
114	Kab. Banjar	189.478.934.879	225.540.392.459	709.407.411.000	272.331.969.107	264.582.388.659	-
115	Kab. Hulu Sungai Tengah	91.332.847.732	138.373.468.142	519.741.516.000	169.416.141.770	202.533.263.392	-
116	Kab. Tabalong	170.033.432.630	353.283.708.236	494.109.854.000	152.343.418.702	334.998.073.948	-
117	Kab. Tanah Laut	128.454.917.429	409.402.276.402	528.690.162.000	239.891.419.691	307.362.098.370	-
118	Kota Samarinda	498.888.664.160	617.118.964.963	659.322.535.000	234.160.199.197	817.179.025.617	-
119	Kab. Minahasa Selatan	38.521.274.380	16.015.481.831	523.238.733.000	243.492.758.581	204.182.303.870	-
120	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	21.553.994.290	13.796.601.765	385.429.131.000	134.767.591.603	131.116.738.066	-
121	Kota Kotamobagu	64.268.887.290	16.261.701.610	376.388.719.000	171.048.865.141	174.470.615.666	-
122	Kab. Minahasa Tenggara	18.632.767.389	14.703.011.072	407.185.484.000	113.970.791.110	158.495.221.278	-
123	Kab. Bolaang Mongondow Timur	14.991.126.130	18.435.456.458	341.807.077.000	129.408.162.373	181.396.134.867	-
124	Kab. Buol	71.743.119.178	33.175.615.437	528.033.354.000	192.891.578.885	269.851.781.546	-
125	Kab. Donggala	60.135.251.909	31.433.848.326	659.731.826.000	208.649.541.107	147.478.090.188	-
126	Kota Palu	267.401.948.491	43.921.500.794	671.600.535.000	195.171.092.200	181.337.240.849	-
127	Kab. Banggai Laut	21.776.178.733	27.808.442.195	397.037.063.000	88.799.346.787	219.201.272.002	-
128	Kab. Bantaeng	94.630.714.707	14.616.800.199	494.749.832.000	215.529.019.670	207.062.877.106	-
129	Kab. Barru	104.627.706.925	14.510.772.567	510.978.699.000	208.448.805.220	260.726.828.093	-
130	Kab. Bulukumba	137.711.717.885	17.844.641.100	705.099.263.000	318.538.927.491	305.330.125.770	11.783.455.900
131	Kab. Enrekang	66.043.333.304	15.244.862.811	534.335.959.000	228.774.951.421	160.111.439.072	-
132	Kab. Gowa	217.112.642.503	18.774.742.466	837.326.483.000	380.981.631.681	453.678.049.493	-
133	Kab. Luwu Utara	113.283.072.478	16.532.736.950	655.693.773.000	255.514.760.202	260.147.531.750	-
134	Kab. Maros	219.813.979.862	25.400.729.967	697.947.111.000	265.357.127.967	411.812.694.455	-
135	Kota Palopo	139.282.846.484	15.523.117.559	516.167.587.000	215.391.889.365	238.791.510.667	15.000.000.000
136	Kab. Pinrang	130.651.477.245	15.678.824.144	693.794.315.000	250.962.539.206	225.073.910.031	-
137	Kab. Sinjai	95.221.950.004	16.196.347.740	585.911.082.000	262.570.872.744	244.406.179.421	-
138	Kab. Takalar	125.186.750.078	17.343.057.624	595.466.518.000	256.130.933.270	177.813.211.088	-
139	Kab. Tana Toraja	106.108.442.619	13.681.154.456	551.496.571.000	128.965.821.928	249.599.106.962	-
140	Kab. Konawe	76.707.518.287	22.055.123.163	673.419.303.000	190.314.716.295	209.044.670.974	78.260.987.118
141	Kab. Muna	46.813.506.587	16.809.056.534	656.128.350.000	243.260.160.556	237.972.320.693	-
142	Kab. Buton Utara	15.266.635.341	15.441.842.713	410.109.235.000	112.502.722.973	167.153.946.412	-
143	Kab. Konawe Kepulauan	15.097.104.763	15.086.330.159	315.499.213.000	90.948.903.711	208.392.758.110	-
144	Kab. Buton Selatan	25.863.331.567	16.090.134.005	343.792.777.000	125.031.358.075	146.653.765.954	-
145	Kab. Badung	4.555.716.407.353	80.192.486.416	330.336.650.000	147.499.745.680	906.765.961.849	-
146	Kab. Klungkung	186.974.283.821	18.401.277.509	530.371.681.000	120.943.257.704	149.850.955.582	-
147	Kab. Alor	62.931.359.773	8.401.014.820	600.599.295.145	264.629.114.328	233.851.534.460	-
148	Kab. Belu	88.592.824.575	9.151.001.086	501.312.256.000	208.832.657.864	194.400.312.398	-
149	Kab. Ende	61.247.210.694	10.112.258.771	621.873.578.000	182.115.289.753	150.890.979.572	-
150	Kab. Flores Timur	55.640.492.628	9.392.202.103	608.246.576.000	216.818.990.907	190.777.763.874	-

151	Kab. Kupang	66.182.995.394	9.531.467.594	681.370.762.000	270.417.611.896	218.108.209.235	-
152	Kab. Sumba Barat	85.182.226.434	8.055.525.156	397.430.281.000	217.843.032.706	261.425.463.836	-
153	Kab. Sumba Timur	75.375.667.964	11.693.068.728	637.391.140.000	169.415.544.661	246.374.738.203	-
154	Kab. Timor Tengah Utara	51.895.359.575	9.201.415.399	581.514.817.375	147.002.815.808	134.026.249.954	-
155	Kota Kupang	171.490.709.097	26.084.780.088	648.250.298.541	226.807.530.550	291.103.993.118	-
156	Kab. Manggarai Barat	103.347.460.592	8.705.767.005	506.495.526.000	251.523.066.541	254.087.794.413	-
157	Kab. Nagekeo	30.850.179.939	7.403.073.148	432.406.320.000	119.884.445.535	150.912.124.380	-
158	Kab. Sumba Tengah	28.757.832.560	7.267.813.594	351.179.193.912	94.958.670.474	139.080.424.047	-
159	Kab. Malaka	41.059.361.102	6.879.609.602	436.038.466.799	138.791.619.406	125.668.753.368	-
160	Kab. Kepulauan Tanimbar	40.443.615.590	11.538.362.472	561.838.215.000	140.556.393.564	174.969.642.058	-
161	Kab. Maluku Tengah	59.820.016.826	19.556.414.001	965.391.210.000	317.645.449.651	345.096.715.810	-
162	Kota Ambon	154.973.387.894	24.913.629.973	674.130.364.000	171.775.430.309	173.060.782.501	-
163	Kab. Seram Bagian Barat	23.233.152.017	11.097.234.018	597.525.057.000	281.042.554.710	276.383.658.525	-
164	Kab. Seram Bagian Timur	24.483.710.263	30.077.698.831	530.650.657.000	168.884.101.312	239.768.852.556	-
165	Kab. Kepulauan Aru	59.274.150.040	10.831.275.282	580.686.128.000	245.644.477.961	226.455.937.732	-
166	Kab. Maluku Barat Daya	49.399.756.084	12.868.592.291	566.039.812.000	96.764.184.296	239.955.993.364	-
167	Kab. Buru Selatan	15.506.213.191	13.614.466.838	420.639.459.000	222.630.267.264	265.655.391.586	-
168	Kab. Biak Numfor	16.303.404.602	55.180.138.678	590.680.088.000	168.667.986.726	111.169.996.719	-
169	Kab. Jayawijaya	91.842.133.976	56.879.279.504	714.016.533.000	268.643.813.140	283.795.850.774	-
170	Kab. Merauke	140.118.335.446	91.596.500.463	1.220.130.325.000	306.239.026.603	462.499.253.786	-
171	Kab. Mimika	342.125.805.716	1.534.433.885.861	609.881.657.700	219.545.311.943	739.236.415.599	-
172	Kab. Nabire	43.876.510.922	65.937.488.211	709.282.575.000	263.979.917.579	224.904.773.296	140.000.000.000
173	Kab. Puncak Jaya	15.420.765.897	64.331.266.356	749.825.236.000	131.694.502.300	286.698.134.773	-
174	Kota Jayapura	243.863.618.164	77.377.272.407	634.300.774.000	124.614.710.613	194.108.454.660	-
175	Kab. Keerom	19.490.489.558	64.605.405.560	545.712.219.000	171.776.040.877	315.134.943.677	200.000.000.000
176	Kab. Tolikara	17.692.766.330	55.249.173.083	734.503.655.000	232.433.220.965	367.369.457.428	-
177	Kab. Boven Digoel	33.670.230.176	64.026.713.052	830.474.810.754	148.712.360.100	399.008.936.244	-
178	Kab. Mappi	35.807.359.398	57.141.655.593	781.328.280.000	152.100.673.067	222.425.001.572	-
179	Kab. Asmat	30.494.955.594	57.138.657.628	895.264.341.000	112.241.299.203	294.410.867.519	-
180	Kab. Waropen	3.539.430.038	62.939.815.852	562.528.293.000	104.092.907.290	190.815.975.361	100.000.000.000
181	Kab. Supiori	11.768.708.653	52.894.151.242	451.175.449.000	75.683.446.738	156.061.573.305	-
182	Kab. Mamberamo Raya	7.755.237.584	66.729.160.321	720.547.800.000	75.210.895.955	236.009.452.723	-
183	Kab. Mamberamo Tengah	7.279.453.267	52.047.496.830	635.796.762.000	137.784.187.570	325.524.341.195	-
184	Kab. Nduga	14.320.672.052	52.854.753.568	632.951.682.000	242.351.745.546	418.217.661.613	-
185	Kab. Puncak	5.340.787.011	54.515.768.871	805.591.888.000	178.133.391.688	208.746.860.923	-
186	Kab. Intan Jaya	9.044.286.151	59.701.968.076	700.866.324.000	154.341.863.150	405.536.098.668	-
187	Kab. Deiyai	1.266.090.259	52.945.434.370	475.401.856.000	150.001.046.414	189.727.186.123	-
188	Kota Temate	96.425.003.777	29.464.683.291	610.569.215.000	109.263.019.267	201.651.885.491	-

189	Kab. Halmahera Barat	21.955.951.449	21.160.914.873	493.248.990.000	277.966.179.429	202.045.704.145	-
190	Kab. Halmahera Timur	66.676.603.420	45.006.944.238	476.196.126.000	99.237.813.589	236.822.223.670	-
191	Kab. Halmahera Selatan	31.501.588.899	54.093.012.051	751.125.982.000	242.796.536.711	309.085.493.189	22.125.650.550
192	Kab. Kepulauan Sula	24.226.118.720	38.311.485.574	475.487.794.000	189.637.591.907	147.015.947.721	-
193	Kab. Pulau Morotai	31.710.476.288	20.105.017.538	391.524.047.000	142.851.217.542	214.931.217.497	-
194	Kab. Pulau Taliabu	8.848.025.318	24.609.446.797	341.053.281.000	102.976.849.067	238.833.364.829	-
195	Kab. Lebak	349.363.426.874	64.635.654.122	1.086.661.291.000	387.752.105.644	313.774.637.682	-
196	Kab. Serang	697.085.199.649	80.550.616.569	1.078.411.345.000	387.690.019.660	589.719.504.503	-
197	Kab. Tangerang	2.872.568.512.687	200.954.614.706	1.176.554.273.724	381.460.784.571	1.763.560.497.024	-
198	Kota Cilegon	578.335.620.416	119.946.085.673	597.861.841.963	123.996.175.236	304.636.619.602	-
199	Kota Tangerang	1.864.385.584.947	261.975.708.160	866.113.340.000	213.587.477.495	1.024.749.198.501	-
200	Kota Serang	164.218.548.654	72.332.263.569	636.602.678.000	26.626.702.999	204.289.084.471	-
201	Kota Tangerang Selatan	1.621.710.653.274	176.107.104.689	571.874.988.075	141.157.634.550	1.019.928.803.901	-
202	Kab. Bangka Tengah	75.995.335.731	71.334.514.306	439.128.449.000	127.994.070.259	191.736.832.391	-
203	Kab. Belitung Timur	109.456.286.247	82.215.733.068	440.170.882.447	100.079.772.515	173.681.140.534	-
204	Kab. Natuna	47.952.668.665	344.866.588.244	368.413.963.000	100.349.629.154	133.685.213.166	-
205	Kab. Karimun	349.015.269.518	168.115.307.421	403.174.617.000	210.972.199.332	255.276.200.412	-
206	Kota Batam	1.084.640.559.853	222.641.082.849	599.074.016.000	75.760.488.300	613.438.215.481	-
207	Kota Tanjung Pinang	160.470.588.594	142.217.342.546	457.336.775.945	100.173.268.328	106.106.337.059	-
208	Kab. Lingga	30.072.594.172	134.212.734.393	455.758.203.000	114.405.753.614	110.204.554.632	-
209	Kab. Bintan	286.602.276.550	140.258.373.448	484.586.669.000	115.572.160.116	206.336.691.232	-
210	Kota Sorong	114.479.184.026	69.450.940.399	471.797.886.000	92.935.300.076	352.965.533.290	200.000.000.000
211	Kab. Teluk Bintuni	40.053.292.404	729.635.055.672	549.667.337.000	115.586.771.274	662.258.366.457	220.000.000.000
212	Kab. Teluk Wondama	12.183.560.218	60.979.812.442	444.837.467.000	132.546.484.315	209.907.488.789	-
213	Kab. Kaimana	40.589.189.655	63.264.186.529	609.928.253.000	36.306.943.195	224.395.105.113	-
214	Kab. Tambrau	5.018.537.971	57.013.786.815	519.425.053.000	167.550.411.626	260.564.144.126	-
215	Kab. Manokwari Selatan	6.708.430.387	53.619.885.381	347.705.874.000	113.928.830.106	158.581.079.127	40.000.000.000
216	Kab. Pegunungan Arfak	7.181.980.148	63.430.957.685	380.420.717.000	128.740.245.564	226.232.893.385	-
217	Kab. Polewali Mandar	145.969.628.794	10.397.860.086	713.339.396.000	299.169.303.514	238.450.051.394	-
218	Kab. Mamasa	30.668.177.787	9.823.785.559	515.625.843.000	186.442.913.656	186.660.034.003	-
219	Kab. Mamuju Utara	32.207.499.622	16.576.005.140	483.136.786.000	148.341.483.525	279.466.711.293	-
220	Kab. Bulungan	116.604.212.250	188.951.404.902	497.449.426.000	121.000.023.775	200.631.037.426	-

Tabel Rasio Kemandirian, Tingkat Kemandirian (Y), dan Pola Hubungan

No.	Nama Daerah	Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
1	Kab. Aceh Besar	0,171	1	Instruktif
2	Kab. Aceh Singkil	0,078	1	Instruktif
3	Kab. Aceh Tengah	0,181	1	Instruktif
4	Kab. Aceh Tenggara	0,108	1	Instruktif
5	Kab. Aceh Utara	0,173	1	Instruktif
6	Kab. Simeulue	0,107	1	Instruktif
7	Kota Banda Aceh	0,329	2	Konsultatif
8	Kota Sabang	0,117	1	Instruktif
9	Kota Langsa	0,204	1	Instruktif
10	Kab. Gayo Lues	0,075	1	Instruktif
11	Kab. Nagan Raya	0,145	1	Instruktif
12	Kab. Aceh Tamiang	0,178	1	Instruktif
13	Kab. Pidie Jaya	0,094	1	Instruktif
14	Kab. Karo	0,169	1	Instruktif
15	Kab. Mandailing Natal	0,080	1	Instruktif
16	Kab. Nias	0,146	1	Instruktif
17	Kab. Tapanuli Utara	0,122	1	Instruktif
18	Kab. Toba Samosir	0,074	1	Instruktif
19	Kota Medan	0,758	4	Delegatif
20	Kota Pematangsiantar	0,172	1	Instruktif
21	Kota Sibolga	0,158	1	Instruktif
22	Kota Padangsidimpuan	0,117	1	Instruktif
23	Kab. Pakpak Bharat	0,046	1	Instruktif
24	Kab. Nias Selatan	0,025	1	Instruktif
25	Kab. Humbang Hasundutan	0,136	1	Instruktif
26	Kab. Serdang Bedagai	0,174	1	Instruktif
27	Kab. Samosir	0,078	1	Instruktif
28	Kab. Batubara	0,082	1	Instruktif
29	Kab. Padang Lawas	0,067	1	Instruktif
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,073	1	Instruktif
31	Kab. Labuhanbatu Utara	0,066	1	Instruktif
32	Kab. Nias Utara	0,089	1	Instruktif
33	Kab. Nias Barat	0,071	1	Instruktif
34	Kota Gunungsitoli	0,053	1	Instruktif
35	Kab. Sijunjung	0,113	1	Instruktif
36	Kota Padang	0,337	2	Konsultatif
37	Kota Sawahlunto	0,103	1	Instruktif
38	Kota Solok	0,085	1	Instruktif

39	Kota Pariaman	0,063	1	Instruktif
40	Kab. Bengkalis	0,115	1	Instruktif
41	Kab. Indragiri Hilir	0,115	1	Instruktif
42	Kab. Indragiri Hulu	0,106	1	Instruktif
43	Kab. Rokan Hulu	0,077	1	Instruktif
44	Kab. Siak	0,209	1	Instruktif
45	Kab. Kepulauan Meranti	0,087	1	Instruktif
46	Kab. Kerinci	0,100	1	Instruktif
47	Kab. Merangin	0,091	1	Instruktif
48	Kab. Muaro Jambi	0,092	1	Instruktif
49	Kota Sungai Penuh	0,060	1	Instruktif
50	Kota Palembang	0,479	2	Konsultatif
51	Kota Pagar Alam	0,116	1	Instruktif
52	Kab. Bengkulu Selatan	0,093	1	Instruktif
53	Kab. Bengkulu Utara	0,138	1	Instruktif
54	Kab. Rejang Lebong	0,104	1	Instruktif
55	Kab. Kaur	0,067	1	Instruktif
56	Kab. Seluma	0,085	1	Instruktif
57	Kab. Mukomuko	0,136	1	Instruktif
58	Kab. Lebong	0,068	1	Instruktif
59	Kab. Bengkulu Tengah	0,040	1	Instruktif
60	Kab. Lampung Barat	0,059	1	Instruktif
61	Kab. Lampung Selatan	0,179	1	Instruktif
62	Kab. Lampung Utara	0,085	1	Instruktif
63	Kab. Lampung Timur	0,084	1	Instruktif
64	Kab. Tanggamus	0,057	1	Instruktif
65	Kota Bandar Lampung	0,382	2	Konsultatif
66	Kab. Pesawaran	0,062	1	Instruktif
67	Kab. Mesuji	0,054	1	Instruktif
68	Kab. Pesisir Barat	0,041	1	Instruktif
69	Kab. Bandung	0,296	2	Konsultatif
70	Kab. Bogor	0,991	4	Delegatif
71	Kab. Garut	0,160	1	Instruktif
72	Kab. Purwakarta	0,302	2	Konsultatif
73	Kab. Subang	0,215	1	Instruktif
74	Kota Bandung	1,059	4	Delegatif
75	Kota Bogor	0,813	4	Delegatif
76	Kota Cirebon	0,541	3	Partisipatif
77	Kota Banjar	0,230	1	Instruktif
78	Kab. Bandung Barat	0,277	2	Konsultatif
79	Kab. Batang	0,227	1	Instruktif
80	Kab. Blera	0,148	1	Instruktif

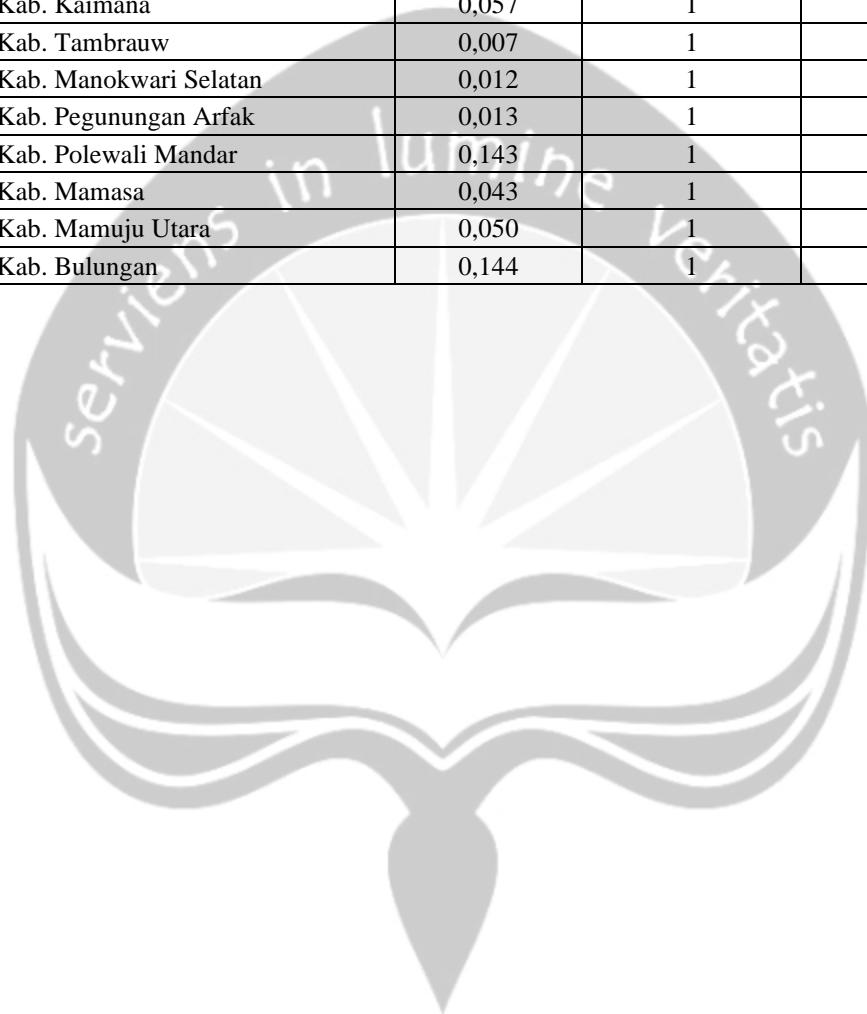


81	Kab. Brebes	0,198	1	Instruktif
82	Kab. Grobogan	0,208	1	Instruktif
83	Kab. Jepara	0,275	2	Konsultatif
84	Kab. Kebumen	0,213	1	Instruktif
85	Kab. Klaten	0,240	1	Instruktif
86	Kab. Kudus	0,263	2	Konsultatif
87	Kab. Magelang	0,233	1	Instruktif
88	Kab. Sukoharjo	0,355	2	Konsultatif
89	Kab. Temanggung	0,236	1	Instruktif
90	Kab. Wonosobo	0,199	1	Instruktif
91	Kota Salatiga	0,372	2	Konsultatif
92	Kab. Sleman	0,653	3	Partisipatif
93	Kota Yogyakarta	0,769	4	Delegatif
94	Kab. Blitar	0,158	1	Instruktif
95	Kab. Bojonegoro	0,111	1	Instruktif
96	Kab. Gresik	0,672	3	Partisipatif
97	Kab. Jember	0,255	2	Konsultatif
98	Kab. Kediri	0,270	2	Konsultatif
99	Kab. Ngawi	0,151	1	Instruktif
100	Kab. Pamekasan	0,178	1	Instruktif
101	Kab. Pasuruan	0,331	2	Konsultatif
102	Kab. Ponorogo	0,186	1	Instruktif
103	Kab. Sampang	0,112	1	Instruktif
104	Kab. Sidoarjo	0,940	4	Delegatif
105	Kab. Tuban	0,296	2	Konsultatif
106	Kota Blitar	0,260	2	Konsultatif
107	Kab. Ketapang	0,121	1	Instruktif
108	Kab. Sambas	0,095	1	Instruktif
109	Kab. Kayong Utara	0,043	1	Instruktif
110	Kab. Barito Selatan	0,100	1	Instruktif
111	Kab. Seruyan	0,105	1	Instruktif
112	Kab. Murung Raya	0,059	1	Instruktif
113	Kab. Barito Timur	0,071	1	Instruktif
114	Kab. Banjar	0,157	1	Instruktif
115	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,110	1	Instruktif
116	Kab. Tabalong	0,170	1	Instruktif
117	Kab. Tanah Laut	0,109	1	Instruktif
118	Kota Samarinda	0,330	2	Konsultatif
119	Kab. Minahasa Selatan	0,049	1	Instruktif
120	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0,040	1	Instruktif
121	Kota Kotamobagu	0,114	1	Instruktif
122	Kab. Minahasa Tenggara	0,035	1	Instruktif

123	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,031	1	Instruktif
124	Kab. Buol	0,095	1	Instruktif
125	Kab. Donggala	0,067	1	Instruktif
126	Kota Palu	0,294	2	Konsultatif
127	Kab. Banggai Laut	0,042	1	Instruktif
128	Kab. Bantaeng	0,131	1	Instruktif
129	Kab. Barru	0,143	1	Instruktif
130	Kab. Bulukumba	0,131	1	Instruktif
131	Kab. Enrekang	0,085	1	Instruktif
132	Kab. Gowa	0,176	1	Instruktif
133	Kab. Luwu Utara	0,122	1	Instruktif
134	Kab. Maros	0,222	1	Instruktif
135	Kota Palopo	0,183	1	Instruktif
136	Kab. Pinrang	0,136	1	Instruktif
137	Kab. Sinjai	0,110	1	Instruktif
138	Kab. Takalar	0,144	1	Instruktif
139	Kab. Tana Toraja	0,153	1	Instruktif
140	Kab. Konawe	0,080	1	Instruktif
141	Kab. Muna	0,051	1	Instruktif
142	Kab. Buton Utara	0,028	1	Instruktif
143	Kab. Konawe Kepulauan	0,036	1	Instruktif
144	Kab. Buton Selatan	0,053	1	Instruktif
145	Kab. Badung	8,164	4	Delegatif
146	Kab. Klungkung	0,279	2	Konsultatif
147	Kab. Alor	0,072	1	Instruktif
148	Kab. Belu	0,123	1	Instruktif
149	Kab. Ende	0,075	1	Instruktif
150	Kab. Flores Timur	0,067	1	Instruktif
151	Kab. Kupang	0,069	1	Instruktif
152	Kab. Sumba Barat	0,137	1	Instruktif
153	Kab. Sumba Timur	0,092	1	Instruktif
154	Kab. Timor Tengah Utara	0,070	1	Instruktif
155	Kota Kupang	0,190	1	Instruktif
156	Kab. Manggarai Barat	0,135	1	Instruktif
157	Kab. Nagekeo	0,055	1	Instruktif
158	Kab. Sumba Tengah	0,063	1	Instruktif
159	Kab. Malaka	0,071	1	Instruktif
160	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,057	1	Instruktif
161	Kab. Maluku Tengah	0,046	1	Instruktif
162	Kota Ambon	0,178	1	Instruktif
163	Kab. Seram Bagian Barat	0,026	1	Instruktif
164	Kab. Seram Bagian Timur	0,034	1	Instruktif

165	Kab. Kepulauan Aru	0,071	1	Instruktif
166	Kab. Maluku Barat Daya	0,073	1	Instruktif
167	Kab. Buru Selatan	0,024	1	Instruktif
168	Kab. Biak Numfor	0,020	1	Instruktif
169	Kab. Jayawijaya	0,088	1	Instruktif
170	Kab. Merauke	0,087	1	Instruktif
171	Kab. Mimika	0,145	1	Instruktif
172	Kab. Nabire	0,037	1	Instruktif
173	Kab. Puncak Jaya	0,016	1	Instruktif
174	Kota Jayapura	0,292	2	Konsultatif
175	Kab. Keerom	0,020	1	Instruktif
176	Kab. Tolikara	0,017	1	Instruktif
177	Kab. Boven Digoel	0,032	1	Instruktif
178	Kab. Mappi	0,036	1	Instruktif
179	Kab. Asmat	0,029	1	Instruktif
180	Kab. Waropen	0,004	1	Instruktif
181	Kab. Supiori	0,020	1	Instruktif
182	Kab. Mamberamo Raya	0,009	1	Instruktif
183	Kab. Mamberamo Tengah	0,009	1	Instruktif
184	Kab. Nduga	0,015	1	Instruktif
185	Kab. Puncak	0,005	1	Instruktif
186	Kab. Intan Jaya	0,010	1	Instruktif
187	Kab. Deiyai	0,002	1	Instruktif
188	Kota Ternate	0,129	1	Instruktif
189	Kab. Halmahera Barat	0,028	1	Instruktif
190	Kab. Halmahera Timur	0,107	1	Instruktif
191	Kab. Halmahera Selatan	0,029	1	Instruktif
192	Kab. Kepulauan Sula	0,034	1	Instruktif
193	Kab. Pulau Morotai	0,057	1	Instruktif
194	Kab. Pulau Taliabu	0,019	1	Instruktif
195	Kab. Lebak	0,227	1	Instruktif
196	Kab. Serang	0,451	2	Konsultatif
197	Kab. Tangerang	1,633	4	Delegatif
198	Kota Cilegon	0,687	3	Partisipatif
199	Kota Tangerang	1,390	4	Delegatif
200	Kota Serang	0,223	1	Instruktif
201	Kota Tangerang Selatan	1,824	4	Delegatif
202	Kab. Bangka Tengah	0,119	1	Instruktif
203	Kab. Belitung Timur	0,176	1	Instruktif
204	Kab. Natuna	0,059	1	Instruktif
205	Kab. Karimun	0,446	2	Konsultatif
206	Kota Batam	1,209	4	Delegatif

207	Kota Tanjung Pinang	0,229	1	Instruktif
208	Kab. Lingga	0,043	1	Instruktif
209	Kab. Bintan	0,387	2	Konsultatif
210	Kota Sorong	0,137	1	Instruktif
211	Kab. Teluk Bintuni	0,025	1	Instruktif
212	Kab. Teluk Wondama	0,019	1	Instruktif
213	Kab. Kaimana	0,057	1	Instruktif
214	Kab. Tambrau	0,007	1	Instruktif
215	Kab. Manokwari Selatan	0,012	1	Instruktif
216	Kab. Pegunungan Arfak	0,013	1	Instruktif
217	Kab. Polewali Mandar	0,143	1	Instruktif
218	Kab. Mamasa	0,043	1	Instruktif
219	Kab. Mamuju Utara	0,050	1	Instruktif
220	Kab. Bulungan	0,144	1	Instruktif



## LAMPIRAN II

## DATA SETELAH TRANSFORMASI (LN)

No	Nama Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal	Kemandirian Keuangan
1	Kab. Aceh Besar	25,80	23,63	27,29	26,01	26,27	0,0
2	Kab. Aceh Singkil	24,54	23,57	26,81	25,50	25,37	0,0
3	Kab. Aceh Tengah	25,74	23,44	27,13	26,07	25,92	0,0
4	Kab. Aceh Tenggara	25,11	23,22	27,09	25,74	25,72	0,0
5	Kab. Aceh Utara	26,17	25,65	27,45	26,63	26,13	0,0
6	Kab. Simeulue	24,87	23,20	26,82	25,61	25,65	0,0
7	Kota Banda Aceh	26,23	24,41	27,11	25,48	25,34	0,7
8	Kota Sabang	24,77	23,18	26,58	25,57	25,46	0,0
9	Kota Langsa	25,52	23,59	26,82	25,61	25,47	0,0
10	Kab. Gayo Lues	24,61	23,56	26,86	25,86	25,93	0,0
11	Kab. Nagan Raya	25,30	23,71	26,94	25,71	25,95	0,0
12	Kab. Aceh Tamiang	25,66	25,17	27,00	25,82	25,90	0,0
13	Kab. Pidie Jaya	24,77	23,21	26,77	25,90	25,91	0,0
14	Kab. Karo	25,79	23,61	27,33	25,94	26,13	0,0
15	Kab. Mandailing Natal	25,16	24,20	27,39	26,24	26,02	0,0
16	Kab. Nias	25,21	23,27	26,78	25,84	26,06	0,0
17	Kab. Tapanuli Utara	25,38	24,35	27,18	25,98	25,93	0,0
18	Kab. Toba Samosir	24,68	23,66	26,99	25,79	25,75	0,0
19	Kota Medan	28,12	26,10	28,09	26,60	27,35	1,4
20	Kota Pematangsiantar	25,64	23,96	27,09	25,96	26,39	0,0
21	Kota Sibolga	25,12	23,51	26,73	25,23	25,68	0,0
22	Kota Padangsidimpuan	25,04	23,64	26,93	25,55	25,45	0,0
23	Kab. Pakpak Bharat	23,72	23,38	26,55	24,99	25,50	0,0
24	Kab. Nias Selatan	23,70	23,49	27,04	26,02	26,12	0,0
25	Kab. Humbang Hasundutan	25,25	23,49	26,98	25,68	25,85	0,0
26	Kab. Serdang Bedagai	25,99	24,51	27,36	26,46	26,58	0,0
27	Kab. Samosir	24,58	23,40	26,84	25,66	25,95	0,0
28	Kab. Batubara	24,89	24,16	27,12	25,74	25,66	0,0
29	Kab. Padang Lawas	24,58	24,03	26,98	25,78	26,04	0,0
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	24,68	24,84	26,95	25,72	26,11	0,0
31	Kab. Labuhanbatu Utara	24,77	24,44	27,10	26,18	26,13	0,0
32	Kab. Nias Utara	24,64	23,30	26,75	25,65	25,98	0,0
33	Kab. Nias Barat	24,42	23,28	26,57	26,06	26,24	0,0
34	Kota Gunungsitoli	24,11	23,46	26,78	25,42	25,94	0,0
35	Kab. Sijunjung	25,09	23,24	27,03	25,66	26,05	0,0
36	Kota Padang	26,91	24,89	27,73	26,30	26,76	0,7
37	Kota Sawahlunto	24,58	23,68	26,65	24,89	25,07	0,0

38	Kota Solok	24,43	23,16	26,71	25,00	25,80	0,0
39	Kota Pariaman	24,20	23,17	26,75	25,14	25,61	0,0
40	Kab. Bengkulu	26,49	28,44	26,57	25,94	27,53	0,0
41	Kab. Indragiri Hilir	25,78	26,14	27,55	26,12	26,09	0,0
42	Kab. Indragiri Hulu	25,44	26,24	27,20	25,81	25,65	0,0
43	Kab. Rokan Hulu	25,17	26,16	27,21	26,18	26,59	0,0
44	Kab. Siak	26,40	27,55	26,50	25,71	25,91	0,0
45	Kab. Kepulauan Meranti	24,94	26,11	26,72	25,79	25,86	0,0
46	Kab. Kerinci	25,11	24,79	27,10	25,77	25,98	0,0
47	Kab. Merangin	25,22	24,88	27,30	26,00	26,06	0,0
48	Kab. Muaro Jambi	25,23	25,61	27,23	25,89	26,40	0,0
49	Kota Sungai Penuh	24,26	24,76	26,77	25,25	25,99	0,0
50	Kota Palembang	27,58	26,20	27,87	26,90	27,47	0,7
51	Kota Pagar Alam	25,02	25,60	26,69	25,46	25,25	0,0
52	Kab. Bengkulu Selatan	24,93	23,33	27,04	25,74	25,28	0,0
53	Kab. Bengkulu Utara	25,49	24,63	27,16	25,91	25,90	0,0
54	Kab. Rejang Lebong	25,16	23,45	27,11	26,02	25,86	0,0
55	Kab. Kaur	24,34	23,36	26,80	25,36	25,23	0,0
56	Kab. Seluma	24,78	23,62	26,93	25,83	25,52	0,0
57	Kab. Mukomuko	25,17	23,79	26,92	25,50	26,06	0,0
58	Kab. Lebong	24,29	23,53	26,73	25,27	25,67	0,0
59	Kab. Bengkulu Tengah	23,88	24,39	26,79	25,49	25,63	0,0
60	Kab. Lampung Barat	24,64	23,97	26,98	26,45	26,39	0,0
61	Kab. Lampung Selatan	26,10	24,41	27,65	25,70	26,67	0,0
62	Kab. Lampung Utara	25,35	24,13	27,58	26,15	25,99	0,0
63	Kab. Lampung Timur	25,55	24,97	27,70	26,60	26,38	0,0
64	Kab. Tanggamus	24,85	24,72	27,38	26,21	25,87	0,0
65	Kota Bandar Lampung	27,03	24,90	27,67	26,30	26,78	0,7
66	Kab. Pesawaran	24,79	23,98	27,23	26,25	26,53	0,0
67	Kab. Mesuji	24,23	24,13	26,82	25,66	26,21	0,0
68	Kab. Pesisir Barat	23,88	23,82	26,76	25,62	26,16	0,0
69	Kab. Bandung	27,56	26,55	28,35	27,33	27,29	0,7
70	Kab. Bogor	28,66	26,29	28,28	27,18	27,90	1,4
71	Kab. Garut	26,77	25,97	28,21	27,21	27,01	0,0
72	Kab. Purwakarta	26,63	25,34	27,47	26,31	26,15	0,7
73	Kab. Subang	26,72	25,73	27,88	26,80	26,91	0,0
74	Kota Bandung	28,58	26,50	28,13	26,86	27,65	1,4
75	Kota Bogor	27,54	25,28	27,40	25,92	26,84	1,4
76	Kota Cirebon	26,81	25,00	27,08	25,83	25,89	1,1
77	Kota Banjar	25,48	24,84	26,63	25,05	25,99	0,0
78	Kab. Bandung Barat	26,77	25,12	27,72	26,59	26,30	0,7
79	Kab. Batang	26,19	24,31	27,38	26,17	25,82	0,0

80	Kab. Blora	26,04	25,48	27,55	26,53	26,94	0,0
81	Kab. Brebes	26,57	24,21	27,91	26,71	26,99	0,0
82	Kab. Grobogan	26,48	24,44	27,72	26,68	26,77	0,0
83	Kab. Jepara	26,63	24,41	27,62	26,48	26,71	0,7
84	Kab. Kebumen	26,59	24,11	27,84	26,69	26,64	0,0
85	Kab. Klaten	26,70	24,44	27,84	26,64	26,68	0,0
86	Kab. Kudus	26,54	26,19	27,42	26,20	26,66	0,7
87	Kab. Magelang	26,51	24,32	27,69	26,43	26,94	0,0
88	Kab. Sukoharjo	26,80	24,00	27,53	26,38	26,69	0,7
89	Kab. Temanggung	26,25	24,64	27,40	26,14	25,95	0,0
90	Kab. Wonosobo	26,15	24,27	27,44	26,35	26,67	0,0
91	Kota Salatiga	26,07	23,92	26,83	25,21	26,13	0,7
92	Kab. Sleman	27,52	24,65	27,63	26,50	26,74	1,1
93	Kota Yogyakarta	27,23	24,57	27,21	25,81	26,51	1,4
94	Kab. Blitar	26,25	25,40	27,74	26,67	26,74	0,0
95	Kab. Bojonegoro	26,78	28,56	27,56	26,58	27,12	0,0
96	Kab. Gresik	27,59	25,94	27,54	26,52	26,64	1,1
97	Kab. Jember	27,12	25,87	28,16	26,89	27,00	0,7
98	Kab. Kediri	26,89	25,64	27,83	26,73	27,03	0,7
99	Kab. Ngawi	26,13	25,44	27,67	26,54	26,45	0,0
100	Kab. Pamekasan	26,13	25,63	27,47	26,31	26,48	0,0
101	Kab. Pasuruan	27,14	26,40	27,80	26,68	26,83	0,7
102	Kab. Ponorogo	26,39	25,40	27,67	26,73	26,72	0,0
103	Kab. Sampang	25,63	25,40	27,44	26,36	26,47	0,0
104	Kab. Sidoarjo	28,15	25,95	27,81	26,75	27,42	1,4
105	Kab. Tuban	26,82	25,76	27,66	26,46	26,93	0,7
106	Kota Blitar	25,82	25,34	26,77	25,37	25,80	0,7
107	Kab. Ketapang	25,97	25,48	27,75	26,54	27,15	0,0
108	Kab. Sambas	25,57	24,24	27,50	26,57	26,38	0,0
109	Kab. Kayong Utara	24,03	23,59	26,88	25,71	25,85	0,0
110	Kab. Barito Selatan	25,12	25,03	27,08	25,80	26,04	0,0
111	Kab. Seruyan	25,26	25,15	27,15	25,95	26,48	0,0
112	Kab. Murung Raya	24,81	25,73	27,23	25,96	26,16	0,0
113	Kab. Barito Timur	24,59	25,06	26,89	25,50	25,25	0,0
114	Kab. Banjar	25,97	26,14	27,29	26,33	26,30	0,0
115	Kab. Hulu Sungai Tengah	25,24	25,65	26,98	25,86	26,03	0,0
116	Kab. Tabalong	25,86	26,59	26,93	25,75	26,54	0,0
117	Kab. Tanah Laut	25,58	26,74	26,99	26,20	26,45	0,0
118	Kota Samarinda	26,94	27,15	27,21	26,18	27,43	0,7
119	Kab. Minahasa Selatan	24,37	23,50	26,98	26,22	26,04	0,0
120	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	23,79	23,35	26,68	25,63	25,60	0,0
121	Kota Kotamobagu	24,89	23,51	26,65	25,87	25,89	0,0

122	Kab. Minahasa Tenggara	23,65	23,41	26,73	25,46	25,79	0,0
123	Kab. Bolaang Mongondow Timur	23,43	23,64	26,56	25,59	25,92	0,0
124	Kab. Buol	25,00	24,23	26,99	25,99	26,32	0,0
125	Kab. Donggala	24,82	24,17	27,22	26,06	25,72	0,0
126	Kota Palu	26,31	24,51	27,23	26,00	25,92	0,7
127	Kab. Banggai Laut	23,80	24,05	26,71	25,21	26,11	0,0
128	Kab. Bantaeng	25,27	23,41	26,93	26,10	26,06	0,0
129	Kab. Barru	25,37	23,40	26,96	26,06	26,29	0,0
130	Kab. Bulukumba	25,65	23,60	27,28	26,49	26,44	0,0
131	Kab. Enrekang	24,91	23,45	27,00	26,16	25,80	0,0
132	Kab. Gowa	26,10	23,66	27,45	26,67	26,84	0,0
133	Kab. Luwu Utara	25,45	23,53	27,21	26,27	26,28	0,0
134	Kab. Maros	26,12	23,96	27,27	26,30	26,74	0,0
135	Kota Palopo	25,66	23,47	26,97	26,10	26,20	0,0
136	Kab. Pinrang	25,60	23,48	27,27	26,25	26,14	0,0
137	Kab. Sinjai	25,28	23,51	27,10	26,29	26,22	0,0
138	Kab. Takalar	25,55	23,58	27,11	26,27	25,90	0,0
139	Kab. Tana Toraja	25,39	23,34	27,04	25,58	26,24	0,0
140	Kab. Konawe	25,06	23,82	27,24	25,97	26,07	0,0
141	Kab. Muna	24,57	23,55	27,21	26,22	26,20	0,0
142	Kab. Buton Utara	23,45	23,46	26,74	25,45	25,84	0,0
143	Kab. Konawe Kepulauan	23,44	23,44	26,48	25,23	26,06	0,0
144	Kab. Buton Selatan	23,98	23,50	26,56	25,55	25,71	0,0
145	Kab. Badung	29,15	25,11	26,52	25,72	27,53	1,4
146	Kab. Klungkung	25,95	23,64	27,00	25,52	25,73	0,7
147	Kab. Alor	24,87	22,85	27,12	26,30	26,18	0,0
148	Kab. Belu	25,21	22,94	26,94	26,06	25,99	0,0
149	Kab. Ende	24,84	23,04	27,16	25,93	25,74	0,0
150	Kab. Flores Timur	24,74	22,96	27,13	26,10	25,97	0,0
151	Kab. Kupang	24,92	22,98	27,25	26,32	26,11	0,0
152	Kab. Sumba Barat	25,17	22,81	26,71	26,11	26,29	0,0
153	Kab. Sumba Timur	25,05	23,18	27,18	25,86	26,23	0,0
154	Kab. Timor Tengah Utara	24,67	22,94	27,09	25,71	25,62	0,0
155	Kota Kupang	25,87	23,98	27,20	26,15	26,40	0,0
156	Kab. Manggarai Barat	25,36	22,89	26,95	26,25	26,26	0,0
157	Kab. Nagekeo	24,15	22,73	26,79	25,51	25,74	0,0
158	Kab. Sumba Tengah	24,08	22,71	26,58	25,28	25,66	0,0
159	Kab. Malaka	24,44	22,65	26,80	25,66	25,56	0,0
160	Kab. Kepulauan Tanimbar	24,42	23,17	27,05	25,67	25,89	0,0
161	Kab. Maluku Tengah	24,81	23,70	27,60	26,48	26,57	0,0
162	Kota Ambon	25,77	23,94	27,24	25,87	25,88	0,0
163	Kab. Seram Bagian Barat	23,87	23,13	27,12	26,36	26,35	0,0



164	Kab. Seram Bagian Timur	23,92	24,13	27,00	25,85	26,20	0,0
165	Kab. Kepulauan Aru	24,81	23,11	27,09	26,23	26,15	0,0
166	Kab. Maluku Barat Daya	24,62	23,28	27,06	25,30	26,20	0,0
167	Kab. Buru Selatan	23,46	23,33	26,77	26,13	26,31	0,0
168	Kab. Biak Numfor	23,51	24,73	27,10	25,85	25,43	0,0
169	Kab. Jayawijaya	25,24	24,76	27,29	26,32	26,37	0,0
170	Kab. Merauke	25,67	25,24	27,83	26,45	26,86	0,0
171	Kab. Mimika	26,56	28,06	27,14	26,11	27,33	0,0
172	Kab. Nabire	24,50	24,91	27,29	26,30	26,14	0,0
173	Kab. Puncak Jaya	23,46	24,89	27,34	25,60	26,38	0,0
174	Kota Jayapura	26,22	25,07	27,18	25,55	25,99	0,7
175	Kab. Keerom	23,69	24,89	27,03	25,87	26,48	0,0
176	Kab. Tolikara	23,60	24,74	27,32	26,17	26,63	0,0
177	Kab. Boven Digoel	24,24	24,88	27,45	25,73	26,71	0,0
178	Kab. Mappi	24,30	24,77	27,38	25,75	26,13	0,0
179	Kab. Asmat	24,14	24,77	27,52	25,44	26,41	0,0
180	Kab. Waropen	21,99	24,87	27,06	25,37	25,97	0,0
181	Kab. Supiori	23,19	24,69	26,84	25,05	25,77	0,0
182	Kab. Mamberamo Raya	22,77	24,92	27,30	25,04	26,19	0,0
183	Kab. Mamberamo Tengah	22,71	24,68	27,18	25,65	26,51	0,0
184	Kab. Nduga	23,38	24,69	27,17	26,21	26,76	0,0
185	Kab. Puncak	22,40	24,72	27,41	25,91	26,06	0,0
186	Kab. Intan Jaya	22,93	24,81	27,28	25,76	26,73	0,0
187	Kab. Deiyai	20,96	24,69	26,89	25,73	25,97	0,0
188	Kota Ternate	25,29	24,11	27,14	25,42	26,03	0,0
189	Kab. Halmahera Barat	23,81	23,78	26,92	26,35	26,03	0,0
190	Kab. Halmahera Timur	24,92	24,53	26,89	25,32	26,19	0,0
191	Kab. Halmahera Selatan	24,17	24,71	27,34	26,22	26,46	0,0
192	Kab. Kepulauan Sula	23,91	24,37	26,89	25,97	25,71	0,0
193	Kab. Pulau Morotai	24,18	23,72	26,69	25,69	26,09	0,0
194	Kab. Pulau Taliabu	22,90	23,93	26,56	25,36	26,20	0,0
195	Kab. Lebak	26,58	24,89	27,71	26,68	26,47	0,0
196	Kab. Serang	27,27	25,11	27,71	26,68	27,10	0,7
197	Kab. Tangerang	28,69	26,03	27,79	26,67	28,20	1,4
198	Kota Cilegon	27,08	25,51	27,12	25,54	26,44	1,1
199	Kota Tangerang	28,25	26,29	27,49	26,09	27,66	1,4
200	Kota Serang	25,82	25,00	27,18	24,01	26,04	0,0
201	Kota Tangerang Selatan	28,11	25,89	27,07	25,67	27,65	1,4
202	Kab. Bangka Tengah	25,05	24,99	26,81	25,58	25,98	0,0
203	Kab. Belitung Timur	25,42	25,13	26,81	25,33	25,88	0,0
204	Kab. Natuna	24,59	26,57	26,63	25,33	25,62	0,0
205	Kab. Karimun	26,58	25,85	26,72	26,07	26,27	0,7

206	Kota Batam	27,71	26,13	27,12	25,05	27,14	1,4
207	Kota Tanjung Pinang	25,80	25,68	26,85	25,33	25,39	0,0
208	Kab. Lingga	24,13	25,62	26,85	25,46	25,43	0,0
209	Kab. Bintan	26,38	25,67	26,91	25,47	26,05	0,7
210	Kota Sorong	25,46	24,96	26,88	25,26	26,59	0,0
211	Kab. Teluk Bintuni	24,41	27,32	27,03	25,47	27,22	0,0
212	Kab. Teluk Wondama	23,22	24,83	26,82	25,61	26,07	0,0
213	Kab. Kaimana	24,43	24,87	27,14	24,32	26,14	0,0
214	Kab. Tambrau	22,34	24,77	26,98	25,84	26,29	0,0
215	Kab. Manokwari Selatan	22,63	24,71	26,57	25,46	25,79	0,0
216	Kab. Pegunungan Arfak	22,69	24,87	26,66	25,58	26,14	0,0
217	Kab. Polewali Mandar	25,71	23,06	27,29	26,42	26,20	0,0
218	Kab. Mamasa	24,15	23,01	26,97	25,95	25,95	0,0
219	Kab. Mamuju Utara	24,20	23,53	26,90	25,72	26,36	0,0
220	Kab. Bulungan	25,48	25,96	26,93	25,52	26,02	0,0

### LAMPIRAN III

**Tabel Statistik Deskriptif sebelum Transformasi**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	220	1.266.090.259	4.555.716.407.353	241.610.137.004,74	504.095.967.908,396
Dana Bagi Hasil	220	6.879.609.602	2.532.807.898.432	105.047.149.485,87	265.241.197.511,255
Dana Alokasi Umum	220	315.499.213.000	2.060.202.697.000	670.274.904.491,30	298.174.368.317,781
Dana Alokasi Khusus	220	26.626.702.999	737.019.669.306	207.996.799.056,95	108.354.093.454,460
Belanja Modal	220	77.527.748.798	1.763.560.497.024	294.582.314.932,76	215.001.723.615,684
Valid N (listwise)	220				

**Tabel Statistik Deskriptif setelah Transformasi**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_Pendapatan Asli Daerah	220	20.96	29.15	25.2743	1.32579
Ln_Dana Bagi Hasil	220	22.65	28.56	24.5185	1.14294
Ln_Dana Alokasi Umum	220	26.48	28.35	27.1521	.38217
Ln_Dana Alokasi Khusus	220	24.01	27.33	25.9385	.49992
Ln_Belanja Modal	220	25.07	28.20	26.2412	.53917
Valid N (listwise)	220				

**LAMPIRAN IV**  
**HASIL UJI ASUMSI KLASIK**

1. Tabel Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		220
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0026814
	Std. Deviation	.25323683
	Absolute	.053
Most Extreme Differences	Positive	.053
	Negative	-.025
Kolmogorov-Smirnov Z		.790
Asymp. Sig. (2-tailed)		.560

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Tabel Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-4.721	1.341		-3.519	.001		
Ln_Pendapatan Asli Daerah	.186	.018	.654	10.613	.000	.551	1.813
Ln_Dana Bagi Hasil	-.007	.019	-.021	-.366	.715	.657	1.523
Ln_Dana Alokasi Umum	.006	.076	.006	.075	.940	.351	2.852
Ln_Dana Alokasi Khusus	-.218	.055	-.288	-3.985	.000	.401	2.494
Ln_Belanja Modal	.222	.049	.317	4.503	.000	.422	2.367

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

## 3. Tabel Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-4.326	1.128		
Ln_Pendapatan Asli Daerah	.017	.015	.100	1.182	.238
1 Ln_Dana Bagi Hasil	.030	.016	.146	1.885	.061
Ln_Dana Alokasi Umum	.110	.064	.181	1.708	.089
Ln_Dana Alokasi Khusus	-.042	.046	-.090	-.904	.367
Ln_Belanja Modal	.057	.041	.133	1.379	.169

a. Dependent Variable: ABS\_RES

## 4. Tabel Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.743 <sup>a</sup>	.552	.542	.25581	1.880

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

**LAMPIRAN V**  
**HASIL UJI HIPOTESIS**

1. Tabel Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Ln_Pendapatan Asli Daerah	.186	.018	.654	10.613	.000
Ln_Dana Bagi Hasil	-.007	.019	-.021	-.366	.715
Ln_Dana Alokasi Umum	.006	.076	.006	.075	.940
Ln_Dana Alokasi Khusus	-.218	.055	-.288	-3.985	.000
Ln_Belanja Modal	.222	.049	.317	4.503	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

2. Tabel Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	17.258	5	3.452	52.743	.000 <sup>b</sup>
Residual	14.004	214	.065		
Total	31.262	219			

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

## 3. Tabel Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.743 <sup>a</sup>	.552	.542	.25581

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

